



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*), diperlukan adanya pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara RI Tahun 2021 No 541);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penerapan Masterplan Smart City melalui Banyuwangi Smart Kampung (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 26);
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 13).
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
7. Pegawai Pemerintah Daerah adalah Pegawai Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
12. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
13. Aplikasi Sistem Informasi adalah sebuah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu terkait dengan proses penyimpanan, pengelolaan dan penyampaian data atau informasi tertentu.
14. Pengguna adalah orang atau masyarakat yang menggunakan sistem informasi dalam layanan penyelenggaraan pemerintahan.
15. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telex*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau *perforasi* yang telah diolah, memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
17. *Firewall* adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk membatasi akses menuju dan/atau dari suatu jaringan computer.
18. *Sistem Administrator* adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengaturan dan pemeliharaan system computer atau jaringan computer sehingga dapat digunakan dengan baik oleh pengguna.

19. Intranet adalah jaringan komputer private yang menggunakan protokol-protokol internet (TCP/IP), yang menghubungkan komputer dan perangkat lain di dalam (intra) sebuah organisasi atau perusahaan.
20. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
21. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah suatu sistem yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya dan dapat menghubungkan antara komputer PC dengan perlengkapan elektronik yang memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi.
22. *Wide Area Network* yang selanjutnya disingkat WAN adalah jaringan komputer mencakup area yang besar antara lain jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan *router* dan saluran komunikasi publik.
23. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi (kirim dan/atau terima) antar *device* yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas.
24. *File log* adalah *file* sistem yang berisi tentang catatan aktifitas dari perangkat lunak dan operasi sistem tertentu.
25. Autentikasi adalah tindakan untuk menunjukkan sesuatu hal yang benar, asli, atau valid.
26. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik sehingga dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
27. *Digital signature* atau tanda tangan digital adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

28. Informasi rahasia adalah informasi yang sangat peka dan beresiko tinggi, yang pembocoran atau penyalahgunaan akses terhadapnya dapat mengganggu kelancaran operasional secara temporer atau mengganggu citra dan reputasi instansi.
29. *Data Centre* adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkait lainnya, seperti sistem telekomunikasi atau pusat jaringan dan penyimpanan data.
30. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah mencakup:

- a. keamanan informasi dalam penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak;
- b. keamanan informasi dalam penggunaan infrastruktur jaringan;
- c. keamanan informasi dalam pengelolaan *Data Center*;
- d. keamanan informasi dalam penggunaan hak akses terhadap informasi;

- e. keamanan informasi dalam pengelolaan sumber daya manusia; dan
- f. keamanan informasi dalam pengelolaan informasi dan dokumen

BAB IV

PRINSIP DAN AZAS PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI

Bagian

Kesatu

PRINSIP

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. kerahasiaan (*confidentiality*);
 - b. integritas (*integrity*);
 - c. keaslian (*authenticity*);
 - d. ketersediaan (*availability*)
 - e. nir penyangkalan (*non-repudiation*);
- (2) Prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian jaminan bahwa informasi yang telah ada tidak diketahui/bocor kepada pihak yang tidak berhak mengetahui dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berhak.
- (3) Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jaminan bahwa data tidak dapat dirubah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, menjaga kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang bisa menyebabkan perubahan pada informasi atau data asli.
- (4) Prinsip keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu jaminan kepastian terhadap informasi yang ditransaksikan dalam sistem informasi yang bersumber dari pihak yang sah.
- (5) Prinsip ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian jaminan atas ketersediaan data atau informasi yang sedang ditransaksikan.
- (6) Prinsip nir penyangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e yaitu tidak bisa disangkalnya oleh seseorang atau pihak tertentu atas tindakannya yang telah dilakukan dalam sebuah sistem informasi.

Bagian

Kedua

AZAS

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas-azas sebagai berikut :
 - a. manfaat;
 - b. keamanan dan keandalan;
 - c. efektif dan efisien;
 - d. keterpaduan;
 - e. integrasi; dan
 - f. otorisasi.
- (2) Azas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemanfaatan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah sehingga dapat menyajikan informasi yang bermanfaat untuk kelancaran pelaksanaan tugas pegawai Pegawai Daerah.
- (3) Azas keamanan dan keandalan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan keamanan atas keadaan informasi yang diolah, disimpan dan disajikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintahan Daerah.
- (4) Azas efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pegawai Pemerintah Daerah agar menjadi efektif dan efisien.
- (5) Azas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kesatuan/keterpaduan dari berbagai kepentingan secara serasi dan proporsional dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

- (6) Azas integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kemampuan pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah untuk memadukan /mempersatukan semua informasi strategis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah.
- (7) Azas otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu kemampuan menjaga keabsahan hak milik atas penyajian informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi dilaksanakan melalui Aplikasi Sistem Informasi;
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menyusun standar operasional prosedur keamanan informasi.
- (3) Standar operasional prosedur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. panduan penggunaan sarana dan prasarana TIK Perangkat Daerah, termasuk penggunaan *e-mail* resmi Perangkat Daerah, penggunaan akses internet, pengaksesan data Perangkat Daerah baik dari LAN, WAN, maupun internet;
 - b. kewajiban Organisasi Perangkat Daerah mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Organisasi Perangkat Daerah atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan internet; dan
 - c. pengimplementasian perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Organisasi Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya pada sarana dan prasarana TIK yang

menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintah Daerah.

- (4) Standar operasional prosedur keamanan informasi yang disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berlaku untuk semua Organisasi Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

Pasal 7

- (1) Pengujian Aplikasi Sistem Informasi yang dirancang, dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi Aplikasi Sistem Informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur jaringan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip dan azas pengelolaan dan pelaksanaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pengembangan *data center* dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pelaksanaan layanan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan dan pengembangan *data center* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi konten, penyimpanan, pengklasifikasian, pemantauan, pengaturan akses dan sarana pendukung lainnya.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan *data center* dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip dan azas pengelolaan dan pelaksanaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Akses terhadap sistem informasi dan dokumen milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh pengguna yang diberi wewenang.
- (2) Pegawai Pemerintah Daerah yang memiliki akses terhadap aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah wajib menjaga kerahasiaan akun dan *password* yang dipercayakan kepadanya.
- (3) Semua pegawai Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki akses terhadap sistem informasi Pemerintah Daerah melakukan perubahan *password* secara berkala.
- (4) Instalasi dan modifikasi perangkat lunak pada komputer milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh pegawai Pemerintah Daerah yang berwenang atau pihak lain atas izin dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian atas nama Bupati dan pengaturannya merujuk kepada standar operasional prosedur pengelolaan perangkat lunak dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah.
- (5) Akses terhadap sistem informasi Pemerintah Daerah harus dicatat dalam *file log* dan dipantau untuk mendeteksi terjadinya penyalahgunaan sistem informasi dan untuk evaluasi terhadap kebijakan pengelompokan *access control*.
- (6) Pegawai Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugasannya sudah tidak lagi menggunakan sistem informasi Pemerintah Daerah, dilakukan penghapusan akun dari Aplikasi Sistem Informasi.

- (7) Akses internet dari dalam jaringan Pemerintah Daerah diatur dengan melakukan penyaringan terhadap informasi yang dilarang oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Akses internet dari luar dan/atau ke dalam jaringan komputer Pemerintah Daerah dibatasi dengan *firewall* dan diatur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) *Remote acces* ke dalam jaringan komputer Pemerintah Daerah dilakukan oleh pegawai Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dan dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang.
- (10) *Remote management* terhadap perangkat jaringan dan *server* oleh sistem administrator hanya dilakukan dari komputer yang telah ditentukan atau komputer lainnya dengan izin dan sepengetahuan pejabat yang berwenang.
- (11) Komputer Pemerintah Dearah yang berfungsi untuk mengakses sistem informasi yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengakses dan mengambil *file* dari *internet*.

Pasal 11

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menunjuk pegawai sebagai *sistem administrator*.
- (2) *Sistem administrator* mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan bidang yang ditanganinya.
- (3) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat memberikan pelatihan kepada pegawai Pemerintah Daerah yang akan menggunakan dan melakukan pemeliharaan teknis terhadap sistem informasi yang baru.
- (4) Pegawai Pemerintah Daerah pada Orgasisasi Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugasannya bekerja dengan perangkat teknologi informasi mendapatkan pelatihan mengenai pemahaman terhadap pentingnya keamanan informasi dan resiko yang menyertainya.

Pasal 12

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pemilik data dan informasi.
- (2) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan autentifikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.
- (4) Perlindungan dan autentifikasi dokumen elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan *digital signature*.
- (5) Pemanfaatan *digital signature* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perlindungan dan pendistribusian informasi rahasia milik Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Standar operasional prosedur yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 20 Februari 2023



BUPATI BANYUWANGI

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI



H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 5